

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tumbangnya rezim orde baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998 terkenal dengan oritarianisme melahirkan gerakan reformasi yang dimotori beberapa tokoh dan didukung gerakan mahasiswa. Era Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J Habibie membawa tatanan baru dalam kehidupan Politik Indonesia. Munculnya harapan masyarakat akan lahirnya tatanan dan sistem politik yang demokratis. Ditandai dengan munculnya banyak partai politik baru yang ikut dalam kontestasi pemilu. Kondisi ini mendorong menguatnya partisipasi masyarakat dibidang poilitik. Di sisi lain perkembangan demokrasi masih mendapatkan kritik dan pertanyaan masyarakat yang terkait dengan praktik politik yang mengatasnamakan demokrasi sehingga menunjukkan adanya paradoks dan ironi.¹

Banyaknya partai politik juga berpengaruh pada sistem pemilihan umum yang akan dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu hak untuk ikut serta menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai sarana demokrasi, pemilu akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan memberikan landasan keabsahan bagi wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen atau pemerintahan.²

Pandangan umum tentang partai politik dimaknai sebagai asosiasi yang mempunyai citra yang buruk, orang yang aktif di partai poitik dianggap sebagai orang yang selalu menjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri namun kenyataannya ada beberapa hal empirik yang benar dan wajar dimana hal

¹Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Administrasi Publik* 3.2 (2004), hal. 119

²Yanto, "Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif Incumbent Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Partai Golkar di Kabupaten Mukomuko)", *Jurnal Professional FIS UNIVED* 1.2 (2004), hal. 62

tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan kampanye pemilu. Dimana banyak kampanye politik yang menyampaikan janji-janji. Dalam konteks seperti ini menjadi gambaran hubungan antara partai politik dan pemilih atau konstituen, dimana belum mencerminkan peran yang signifikan untuk melakukan perubahan kemudian hal tersebut sekali dalam waktu yang lama. Orang partai dianggap sebagai penipu, orang yang suka ngomong melulu, orang yang selalu gila kekuasaan, orang yang selalu menjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri.³ Walaupun tidak seluruh persepsi itu benar, namun beberapa alasan yang mendorong timbulnya asosiasi pesimistik tersebut didasarkan hal-hal empirik yang benar dan wajar. Siapapun akan mudah menyetujuinya bahwa hanya ketika kampanye pemilu saja (terutama di Indonesia) orang-orang partai dengan segala janji- janjinya mendekati "umat"nya agar mau mendukung partai mereka. Dalam konteks seperti itu, ada yang mengibaratkan hubungan antara partai politik dan umat bagaikan gerhana. Dalam fenomena gerhana kelihatannya ada dua planet saling bertemu, tetapi kenyataannya tidak, dan itu pun terjadi hanya sesekali dalam bentangan waktu yang lama.⁴

Disinilah tugas partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dimana partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat disaat kampanye saja atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada proses evaluasi. Kenyataannya partai politik justru memberikan contoh yang buruk, hal ini tercermin pada kampanye pemilu. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan *elite* dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.⁵ Terlepas dari masih banyaknya stigma negatif, partai politik tentu saja memiliki andil yang sangat kuat bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negara Indonesia.

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Partai

³Tulus Warsito, *Pembangunan Politik Refleksi Kritis atas Krisis*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1999, hal. 94

⁴Tulus Warsito, *Ibid*

⁵Ellya Rosana, "Partai Politik Dan Pembangunan Politik", *Jurnal TAPIS* 8.1 (2012), hal. 136

politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.⁶

Salah satu fungsi partai politik ialah sebagai tempat atau wadah untuk menampung aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah pusat, maka dari itu penting bagi setiap partai politik untuk dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih pada saat datangnya pemilihan umum, tugas utama partai politik adalah memperkenalkan calon-calon kandidat yang mereka usung.

Kehidupan partai politik di Indonesia cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis dan mengesampingkan nilai ideologi. Pergeseran nilai ideologi dalam partai politik bukan sesuatu yang baru. Demi kepentingan kekuasaan, partai politik akan berlomba-lomba membuka diri untuk dapat mewadahi semua basis pemilih. Kondisi ini menjadikan ideologi partai tidak lagi menjadi unsur utama dalam pembuatan keputusan internal partai, selain itu ideologi tidak lagi menjadi tolak ukur dalam menyusun kebijakan. Fenomena menarik ketika partai kader atau partai doktriner semakin membuka diri pada partai-partai berideologi sekuler ataupun nasionalis. Sehingga partai tersebut bertransformasi menjadi partai yang pragmatis.⁷

Sejarah lahirnya partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai

⁶T May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003, hal. 87

⁷Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias, "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi", *Jurnal Kajian Komunikasi* 5.1 (2017), hal. 44

manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah *modern* atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*). Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.⁸

Kita ketahui bahwa ada banyak jenis kampanye, yang pertama jenis kampanye berdasarkan orientasinya dan yang kedua yaitu kampanye yang berdasarkan isinya, semua bentuk dan jenis kampanye tersebut membutuhkan sarana prasarana atau media kampanye sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Beberapa jenis media kampanye yang sering digunakan antara lain media elektronik (televisi, radio, hp); media komunikasi kelompok (pameran, seminar, diskusi panel); media cetak (koran, tabloid, majalah); media digital (*website*, sosial media, *email*, aplikasi, *chatting* dan lainnya); media luar ruangan (poster, *banner*, *billboard*, papan nama).⁹

Pada era digital seperti sekarang tentu sangat membantu memudahkan partai politik dalam berkampanye, kemajuan teknologi membuat kampanye tidak hanya terpaku pada cara yang itu-itu saja. Disini pula tantangan bagi partai politik untuk berinovasi dalam berkampanye, tentu dengan tujuan utama menyampaikan segala informasi ke masyarakat dengan mudah. Tidak hanya lewat media namun sarana dan prasarana untuk berkampanye juga dibutuhkan, terlebih apabila daerah target kampanye tersebut masih terbelah pelosok dan masih sulit untuk menerima informasi-informasi dari luar baik itu warganya ataupun akses desa tersebut.

Salah satu media kampanye yang sangat ampuh ialah media sosial. Maraknya *traffic* penggunaan media sosial sudah bukan hal yang baru di Indonesia.

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Garamedia, 1985, hal. 159-160

⁹<https://symbianplanet.net/pengertian-kampanye/>. Diakses pada 02 Mei 2020

Sejak mengalami *booming* di tahun 2012, keterikatan masyarakat terhadap media sosial semakin meningkat. Media sosial yang awalnya hanya digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi. Melihat fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk mempromosikan produk mereka. Bahkan, menjelang Pemilu Legislatif, Partai Politik mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan caleg mereka.¹⁰

Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya: ini berarti interaksi dan partisipasi. Dalam beberapa studi yang berbeda dari kebiasaan *voting* warga sejak investigasi *Lazarsfeld* klasik pada 1940-an hasil menunjukkan bahwa keputusan voting tidak biasanya didasarkan pada satu langkah komunikasi. Lebih penting adalah dua langkah komunikasi, yang berarti percakapan dengan pemimpin opini, kolega, teman dan kenalan yang dapat mengkonsolidasikan baik atau melemahkan pendapat pemilih.¹¹

Dalam kampanye politik, salah satu faktor pendukung yang penting adalah *public relation*, dengan menggunakan saluran *digital* yaitu media sosial. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *digital political public relations*. Terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan *digital public relations*, yaitu pertama, memastikan fungsi manajemen bahwa komunikasi dalam lingkup *digital* harus sesuai dengan prioritas strategi organisasi. Penggunaan komunikasi digital pada level rendah dianggap cukup berbahaya terutama dalam mengendalikan pesan-pesan yang berpotensi mengandung kontroversi atau memicu polemik. Kedua, organisasi seharusnya memiliki fokus pada hubungan (*relationship*) yang dapat mempengaruhi organisasi. Penggunaan *digital public relations* tidak dapat

¹⁰Berliani Adha, "Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia", *Jurnal Visi Komunikasi* 13.1 (2014), hal. 106

¹¹Social Media, *The New Power Of Political Influence*. Version 1.0 Ari-Matti Auvinen
Centre for European Studies

menghasilkan dukungan publik jika tidak memiliki fokus pada bagaimana membangun hubungan yang baik dengan publik.¹²

Kampanye rapat umum yang saat ini terlihat lebih sepi telah beralih pada kampanye dalam media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*, dimana media sosial mampu menjadi media dialog antara caleg maupun parpol dengan konstituennya. Hal ini merupakan fenomena baru di Indonesia yang akan terus berkembang. Namun demikian, yang perlu diperhatikan ialah bahwa media sosial juga membuat semakin maraknya terjadi kampanye hitam yang dapat semakin merusak tatanan politik dan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus berperan lebih baik dalam memberi dorongan maupun melakukan pengawasan dengan cara merangkul komunitas pengguna media sosial untuk menyukseskan Pemilu melalui sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi, serta mendorong para pengguna media sosial untuk tetap mengembangkan etika dalam perbincangan di dunia maya melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan kreatif.¹³

Kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.¹⁴ Dalam pasal 77, UU No. 8 Tahun 2012 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Makna dari bertanggung jawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Atau bisa juga bermakna setiap janji dalam kampanye benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya setelah memperoleh jabatan atau kekuasaan.¹⁵

Penyelenggaraan pemilu serentak dapat berakibat pada pecahnya konsentrasi dalam upaya pemenangan Presiden, DPR, DPD, DPRD propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Hal ini dapat mempengaruhi persiapan kampanye parpol

¹²Kaye D. Sweetser, *Digital political public relations. Political public relations: Principles and applications*. 2011, hal. 293-313

¹³Debora Sanur Lindawati, "Efektivitas Kampanye Pemilu Legislatif 2014", *Politica* Vol. 4 No. 2 November, 2013, hal. 20

¹⁴Gun Gun Heryanto, dkk, *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

¹⁵Yanto, *Ibid*, hal. 62

untuk memenangkan kursi-kursi tersebut. Persaingan internal Parpol dalam memperebutkan kursi legislatif juga tidak terelakkan. Jadwal kampanye yang relatif singkat menyebabkan proses kampanye bagi calon legislatif menjadi tidak mudah. Selain itu, Parpol yang kadernya menjadi capres dan cawapres menjadi lebih diuntungkan karena memperoleh ikon atau simbol tokoh yang bisa menaikkan elektabilitas parpolnya. Disisi lain partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bukan berasal dari kader partai akan merasa kurang diuntungkan dalam elektabilitasnya.¹⁶

Pemilihan umum pertama terjadi pada masa Orde Baru dengan dilakukannya penyederhanaan dan penggabungan (fusi) pada partai-partai politik oleh pemerintah. Ketiga kekuatan politik adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya. Dengan berjalannya waktu, partai-partai politik di Indonesia mulai berkembang pasca terjadinya reformasi, salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera atau yang dikenal dengan sebutan PKS.¹⁷

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berdiri pada tanggal 20 April 2002 ini adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998. Perubahan dari PK ini diakibatkan oleh UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 yang memperlakukan batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) sebanyak 2%, oleh karena itu PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali pada pemilu berikutnya.¹⁸

Sepanjang kurun waktu 1998-2005, PKS merupakan kelompok fundamentalis, yang berkembang dikalangan menengah perkotaan, namun berbeda dari kelompok Islam modernis lainnya seperti Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Sebagai salah satu partai yang berlaga di dalam pemilu di Indonesia, PKS tetap setia dengan pandangan Islam fundamentalisnya, akan tetapi

¹⁶Rofiq Anwar, "Mengkaji Efektifitas Kampanye Politik Dalam Perspektif Public Relations", *ETTISAL Journal of Communication* 4.1, (2019), hal. 68

¹⁷Yoga Ade Perdana, Skripsi: "Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pileg 2014 Di Kabupaten Boyolali" (Semarang: UNDIP, 2014), hal. 2

¹⁸Yoga Ade Perdana, *Ibid*, hal. 3

menunjukkan pandangan moderat dalam berbagai hal. Fundamentalslisme moderat setuju untuk bersikap kooperatif dan kompromi terhadap pihak lain sejauh kepentingan dan tujuan politik mereka juga terakomodasi. Fundamentalis moderat cenderung setuju dengan demokrasi, karena dengan demokrasilah mereka bisa eksis, dan memberikan ruang untuk sebuah pemerintahan yang populer berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁹

Berdasarkan fenomena tersebut, keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin bagi sebuah partai politik yang memiliki ideologi religius untuk meliberalisasi dan menghibur demokrasi, mungkin karena PKS tidak memiliki pilihan selain melakukan negosiasi dan berinteraksi dengan aktor politik lainnya melalui koalisi dan politik parlementer, bahkan dituntut untuk memperluas pemilihnya hingga menjangkau pemilih non-Islam.²⁰

Kesediaan untuk menerima demokrasi, masuk di parlemen dan berkompetisi memperebutkan segmen politik non-Islam, menunjukkan bahwa, PKS sama sekali bukanlah ancaman bagi demokrasi. PKS percaya bahwa prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam Islam dan konteks Indonesia. Bagi PKS, demokrasi membuka ruang kesempatan bagi partai politik Islam untuk mencapai tujuan politiknya.²¹

Salah satu kota yang berpotensi untuk mendulang suara pemilih pada pemilihan umum 2019 adalah kota Depok. Kota Depok menjadi kota yang potensial untuk partai politik dalam menjalankan kampanye politiknya terutama PKS, karna masyarakatnya yang mudah menerima informasi serta letak wilayahnya yang strategis dan mudah diakses hingga tidak ada kendala dalam hal penyampaian infomasi dalam berkampanye langsung ataupun tidak langsung. Selain itu pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Depok, partai keadilan

¹⁹Firman Noor, "Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS)", *Studi Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies*, (2007), 14(3)

²⁰Noorhaidi Hasan, "Islamist Party, Electoral Politics And Dawah Mobilization Among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia", *Journal Of Indonesian Islam*, (2012), 6(1)

²¹Ahmad Ali Nurdin, Democratic Experiences In Recruiting Firman Members And Leaders. *Journal Al-Jamiah*, (2011), 49(2)

sejahtera menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak yaitu 180.219 suara. Hal tersebut tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam berkampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah usai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 pada Sabtu (2/5/2019). Hasilnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh suara terbanyak di DPRD Kota Depok. Berdasarkan data yang diterima, terdapat enam daerah pemilihan (dapil) di kota Depok. Dari 50 kursi yang tersedia, PKS meraih 12 kursi. Di posisi kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh 10 kursi. Jumlah suara PKS di Depok juga lebih tinggi dibanding PDI-P. Perolehan suara PKS yakni 180.219 suara, sedangkan PDI-P memperoleh 165.479 suara. Jika dibandingkan pada Pemilu 2014, PDI-P saat itu memperoleh suara terbanyak yakni 165.236 suara atau mendapatkan 11 kursi. Sementara itu, PKS memperoleh 113.787 suara atau mendapatkan enam kursi. Dengan demikian, pada Pemilu 2019, PKS menguasai parlemen Kota Depok dan menggeser kedudukan PDI-P.²²

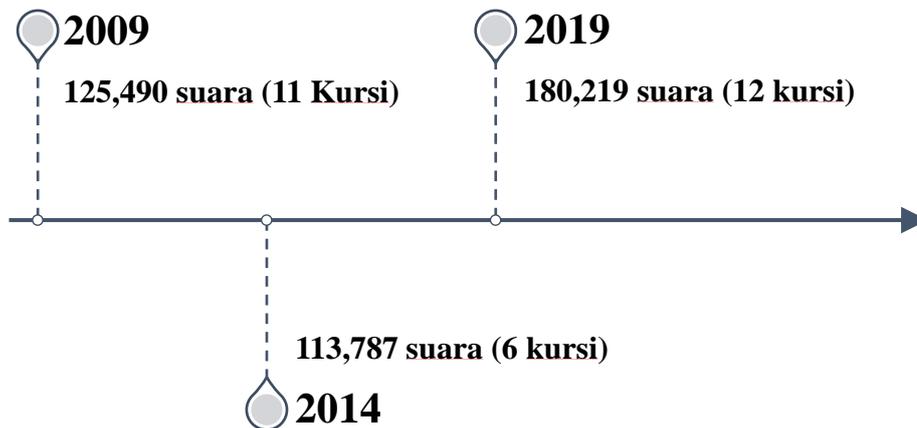
Setelah PKS dan PDI-P, perolehan kursi terbanyak ketiga di DPRD Kota Depok adalah Gerindra dengan 10 kursi dan perolehan 133.180 suara. Kemudian, Golkar meraih 5 kursi dengan perolehan 91.061 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 4 kursi dengan perolehan 62.763 suara, Demokrat memperoleh 3 kursi dengan perolehan 60.654 suara. Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 2 kursi dengan perolehan 41.523 suara, dan terakhir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 1 kursi dengan perolehan 37.958 suara.²³

²²<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/20/06122931/pks-kuasai-kursi-dprd-kota-depok?page=1>. Diakses pada 07 Mei 2020

²³<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/20/06122931/pks-kuasai-kursi-dprd-kota-depok?page=2>. Diakses pada 07 Mei 2020

Gambar 1.1

Perolehan suara dan kursi PKS pada Pemilihan Umum tahun 2009, 2014 dan 2019 di kota Depok



Tabel 1.1

Perolehan suara partai pada Pemilihan Umum tahun 2009, 2014, 2019 di kota Depok

Peringkat	2009	2014	2019
1.	Demokrat 186,548 (15 kursi)	PDIP 165,236 (11 kursi)	PKS 180,219 (12 kursi)
2.	PKS 125,490 (11 kursi)	Gerindra 137,887 (9 kursi)	PDIP 165,479 (10 kursi)
3.	Golkar 74,757 (7 kursi)	PKS 113,787 (6 kursi)	Gerindra 133,180 (10 kursi)
4.	PDIP 53,290 (5 kursi)	Golkar 94,365 (5 kursi)	Golkar 91,061 (5 kursi)
5.	PAN 44,450 (5 kursi)	PAN 67,672 (6 kursi)	PAN 62,763 (4 kursi)
6.	Gerindra 40,185 (3kursi)	Demokrat 65,678 (5 kursi)	Demokrat 60,654 (3 kursi)

7.	PPP 28,495 (2 kursi)	PPP 60,164 (4 kursi)	PPP 41,523 (2 kursi)
8.	PKB 19,747 (1 kursi)	Hanura 45,026 (2 kursi)	PSI 37,958 (1 kursi)
9.	PDS 13,052 (1 kursi) ²⁴	PKB 32,706 (1 kursi)	
10.		Nasdem 25,452 (1 kursi)	
11.		PBB 9,997 (0 kursi)	
12.		PKPI 6,207 (0 kursi) ²⁵	

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada ulasan dalam latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalahnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PKS menerapkan strategi yang sudah dicanangkan pada pemilihan umum tahun 2019 ?
2. Apakah ada inovasi yang dilakukan oleh PKS untuk menjadikan kampanye pemilihan umum tahun 2019 menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ?
3. Apakah terjadi peningkatan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan umum DPRD kota Depok tahun 2019 ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi masalahnya tentang strategi kampanye politik partai keadilan sejahtera dalam pemilihan umum tahun 2019 di kota depok.

²⁴Data yang diperoleh dari KPU kota Depok

²⁵<https://www.depoklik.com/blog/berikut-hasil-pemilu-legislatif-di-depok/>. Diakses pada 09 November 2021

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada adalah:

1. Bagaimanakah strategi kampanye PKS dalam pemilu tahun 2019 di kota Depok?
2. Apakah ada inovasi yang dilakukan oleh PKS untuk menjadikan kampanye pemilihan umum tahun 2019 menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui strategi kampanye PKS pada pemilihan umum legislatif DPRD kota Depok tahun 2019.
2. Mengetahui inovasi yang dilakukan oleh PKS untuk menjadikan kampanye pemilihan umum tahun 2019 menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.
3. Mengetahui pengaruh dan dampak dari kampanye PKS pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat, yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manfaat secara empiris dan manfaat secara teoritis, sebagai berikut

A. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi pembaca terkait Ilmu Politik yang berkaitan dibidang kampanye partai politik.

B. Secara Empiris

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan kesempatan untuk dapat menerapkan teori-teori dalam perkuliahan, dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan peneliti terkait partai politik, masyarakat, dan pemerintah.

b) Bagi Partai Keadilan Sejahtera

Sebagai salah satu pustaka bagi PKS mengenai dasar-dasar dan strategi dalam berkampanye serta fungsi partai politik dalam negara demokrasi, serta catatan sejarah perjalanan PKS dalam dunia perpolitikan khususnya partai politik.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai berkas penelitian berupa pengetahuan mengenai partai politik, masyarakat, dan pemerintah. Menjadi dokumentasi laporan mengenai kampanye Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok.

d) Bagi Pihak Lain

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan Ilmu Politik khususnya dan wawasan mengenai kesatuan birokrasi antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah.